

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

SDGs adalah tujuan bersama di seluruh dunia, setiap negara harus menerapkannya untuk mencapainya. Pemerintah di tingkat lokal atau regional juga memainkan peran penting dalam mendefinisikan dan melaksanakan SDGs. Dalam perjanjian itu sendiri, tujuan-tujuan itu disebutkan secara umum dan umum, tanpa menjelaskan rinci bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk mencapainya, meskipun bersifat universal. Ini menjadi masalah terutama di negara-negara yang masih beradaptasi dengan perubahan yang terjadi pada Tujuan Pembangunan Milenial (MDGs), yang merupakan dasar dari SDGs saat ini. Adaptasi itu sendiri menimbulkan masalah lain, seperti partisipasi yang rendah dan ketidaksamaan dalam agenda di berbagai negara. Indonesia harus menyesuaikan program pembangunan saat ini dengan SDGs. Dalam program pembangunan nasional, proses adaptasi mungkin tidak menjadi masalah bagi bagian inti, tetapi justru menyebabkan ketidakpastian di tingkat regional dan lokal (Sutriadi, 2020).

Tujuan pembangunan berkelanjutan global yang dikenal sebagai Sustainable Development Goals (SDGs) bertujuan untuk mencapai berbagai aspek berkelanjutan, seperti ekonomi, pendidikan, mengakhiri kemiskinan, institusional, lingkungan, dan sosial (Stevani et al., 2024). Untuk mencapai tujuan tersebut, banyak pihak, termasuk pemerintah, seluruh lapisan masyarakat, instansi terkait, dan individu, harus bekerja sama dengan baik. Untuk

menciptakan lingkungan hidup yang aman, keselamatan, dan kualitas hidup yang layak untuk generasi mendatang, pembangunan berkelanjutan memerlukan rencana yang matang yang menggabungkan berbagai elemen ke dalam proses pembangunan (Hidayat et al., 2023).

Dalam hal ini, SDGs memiliki 169 target dan 17 tujuan yang harus dicapai guna melangsungkan program dan mencapai Tujuan Pembangunan Milenium, yang akan berakhir pada tahun 2015. Sifat dari setiap tujuan yaitu berkelanjutan, yang berarti keberhasilan satu tujuan berdampak pada keberhasilan tujuan lain (Boedirochminarni, 2024). Salah satunya terdapat poin penting seperti tanpa kemiskinan pada poin ke 1, kesehatan yang baik dan kesejahteraan pada poin ke 3, dan pendidikan berkualitas pada poin ke 4.

Semua negara di dunia, terutama negara berkembang, menghadapi masalah kemiskinan. Berbagai faktor yang saling terkait, termasuk pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, lokasi, geografi, gender, dan lingkungan, memengaruhi masalah kemiskinan. Perbedaan dalam kemampuan, kesempatan, dan pendapatan menyebabkan kemiskinan. Kekurangan nutrisi, perawatan kesehatan yang buruk, dan tingkat pendidikan yang rendah adalah beberapa bentuk kemiskinan (Kevin, 2022). Salah satu masalah yang sering terjadi di setiap negara adalah kemiskinan. (Firmansyah, 2023) menyatakan bahwa kemiskinan dapat dianggap sebagai salah satu masalah tertua di dunia karena penelitian tentang masalah ini telah berlangsung selama berabad-abad. Mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apa pun adalah salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan yang sering terjadi pada sebuah negara. (Tjibrata, 2021) menyatakan kemiskinan tetap menjadi isu besar di banyak negara, termasuk Indonesia, dengan dampaknya yang meluas seperti akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta kesulitan dalam menyimpan dan berinvestasi. Masalah ini tidak hanya mengancam kesejahteraan individu, tetapi juga berpotensi menciptakan lingkungan yang rentan terhadap kekerasan dan kejahatan. Sudah banyak upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan melalui kebijakan-kebijakan pembangunan, tantangan tersebut masih berkelanjutan dan menunjukkan perlunya perhatian yang lebih besar terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Kemiskinan dari perspektif ekonomi dapat disebabkan oleh tiga faktor utama. Pertama, ketidaksetaraan dalam kepemilikan sumber daya yang menghasilkan disparitas pendapatan. Individu miskin cenderung memiliki akses yang terbatas dan rendah kualitas terhadap sumber daya alam. Kedua, kemiskinan disebabkan oleh perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia, yang mengarah pada produktivitas yang rendah dan kompensasi yang rendah. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya kualitas sumber daya manusia termasuk pendidikan yang kurang memadai, ketidakberuntungan, diskriminasi, atau keturunan. Ketiga, kemiskinan dapat timbul akibat disparitas dalam akses terhadap modal (Azizah, 2018).

Berikut merupakan provinsi di tiga wilayah waktu dengan tingkat perentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia pada tahun 2022:



Gambar 1.1. Provinsi di Tiga Wilayah Waktu dengan Persentase Penduduk Miskin Tertinggi di Indonesia.

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Gambar 1.1 memperlihatkan jumlah persentase penduduk miskin per Provinsi pada tiga wilayah waktu di Indonesia, dengan jumlah tertinggi pada Wilayah Barat Indonesia jatuh kepada Provinsi Aceh dengan angka 14,64%, pada Wilayah Bagian Tengah terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan angka 20,05%, dan pada Wilayah Bagian Timur terletak di Provinsi Papua dengan angka 26,56%. Kondisi kemiskinan di Indonesia akan menjadi masalah serius dan harus dipikirkan serta secepatnya segera ditangani oleh pemerintah.

Agenda SDGs untuk pembangunan sektor ekonomi berfokus pada tujuan program berikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memberikan kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak bagi semua; membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri yang inklusif dan berkelanjutan yang mendorong inovasi; mengurangi disparitas antara negara dan antar negara; dan memberikan jam

kerja yang fleksibel (Anas, 2024). Dengan adanya program SDGs ini salah satunya akan membuat masyarakat di sebuah negara setiap dunia terhindar dari kemiskinan, tanpa kelaparan, mendapatkan kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, pekerjaan yang layak. Agenda pembangunan berkelanjutan, atau SDGs, yang harus dilaksanakan oleh setiap negara pada tahun 2030, akan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan suatu masyarakat.

Tingkat pendidikan akan menentukan seberapa berhasil suatu masyarakat dalam menangani masalah kompleks untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Tujuan pendidikan berkualitas (Tujuan 4) mencakup tidak hanya memberikan pendidikan yang inklusif dan merata tetapi juga meningkatkan peluang belajar, yang merupakan prioritas dalam pembangunan berkelanjutan. (Zulyanto, 2022) menyatakan bahwa pendidikan dan kesehatan setiap orang sangat penting dan diperlukan untuk pembangunan modal manusia jika kita ingin menjadi produktif dan meningkatkan taraf hidup kita. Pendidikan dan pengentasan kemiskinan memiliki hubungan yang linier dengan pendidikan dan penghasilan. Selain itu, kepala keluarga yang berpendidikan rendah atau buta huruf merupakan faktor yang menentukan tingkat kemiskinan.

Peningkatan pembangunan pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi yang saling terkait dalam pembentukan modal manusia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Investasi dalam sektor-sektor ini memungkinkan negara untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya akan mendorong kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan produktivitas penduduk menjadi pendorong utama dalam meningkatkan kesejahteraan sosial (Isroviyah, 2022).

Intervensi pemerintah dalam memperbaiki kesehatan juga merupakan sebuah alat kebijakan yang penting untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Faktor yang mendasari kebijakan ini adalah bahwa peningkatan kesehatan akan meningkatkan produktivitas individu yang berada dalam golongan miskin. Kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan kapasitas kerja, mengurangi absensi kerja, dan meningkatkan hasil kerja, sehingga membantu individu miskin untuk keluar dari kondisi kemiskinan (Rianti et al., 2023).

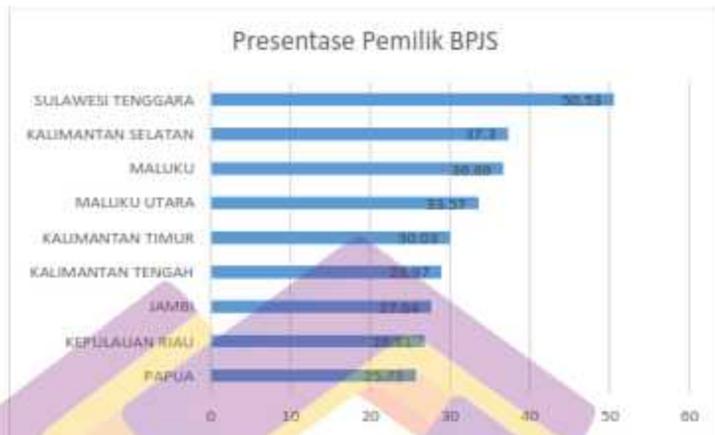
Menurut (Indriani, 2020) *Universal Health Coverage* (UHC) merupakan faktor utama dalam meningkatkan pertumbuhan tenaga kerja, peningkatan gaji, dan produktivitas tenaga kerja. UHC juga berperan dalam mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan perlindungan keuangan saat terjadi kejadian yang mengancam secara finansial akibat masalah kesehatan. Selain itu, UHC merupakan bagian integral dari komitmen global dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDG).

Pembangunan sektor kesehatan di Indonesia bertujuan untuk mencapai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tetapi mayoritas pendanaan kesehatan masih berasal dari rumah tangga melalui pembayaran langsung (*out-of-pocket/OOP*). Biaya kesehatan yang besar dari rumah tangga dapat mengganggu pola konsumsi mereka dan bahkan menyebabkan kemiskinan (Javadikasgari et al., 2018). Namun, menurut (Saputri et al., 2023.) peningkatan jumlah peserta JKN belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan dan penyebaran yang

merata dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Berdasarkan Data Statistik JKN 2015–2019, ketersediaan FKTP secara nasional mengalami penurunan. Pada tahun 2014, rasio ketersediaan FKTP adalah 13 FKTP per 100.000 peserta JKN, namun angka tersebut menurun menjadi 11 FKTP per 100.000 peserta JKN (atau 1 FKTP untuk 9.000 peserta) pada tahun 2018. Meskipun demikian, target rasio 1 dokter praktik umum untuk 5.000 peserta telah tercapai. Pada tahun 2019, BPJS Kesehatan melaporkan bahwa rasio dokter terhadap peserta JKN adalah 1 dokter untuk setiap 4.369 peserta. Namun, perlu ditekankan bahwa masih ada provinsi di Indonesia, terutama di kawasan timur, yang memiliki rasio dokter terhadap peserta JKN lebih dari 5.000.

Januari 2005, PT. Askes mendapatkan tugas untuk melaksanakan Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat miskin yang kemudian dikenal sebagai Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin), dengan tujuan memberikan perlindungan kesehatan kepada 60 juta jiwa masyarakat miskin yang iurannya ditanggung oleh negara. Pada tahun 2011, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang mengatur penyelenggaraan jaminan sosial secara universal bagi seluruh warga Indonesia (Wijayanti, 2020).

Berikut adalah grafik Tiga Provinsi di Tiga Wilayah Waktu berbeda dengan Persentase Penduduk Yang Memiliki Jaminan Kesehatan Berupa BPJS pada tahun 2022:



Gambar 1.2. Presentase Pemilik Jaminan Kesehatan BPJS Tahun 2022.

Sumber: Badan Pusat Statistik 2022

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa dari tiga wilayah berbeda dengan kepemilikan jaminan kesehatan BPJS terendah, Provinsi Papua berada di posisi paling rendah dengan angka sebesar 25,73% diikuti dengan Kepulauan Riau dengan angka sebesar 26,81% dan Jambi sebesar 27,64% dan disusul dengan daerah lainnya. Hal ini memperlihatkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan jaminan kesehatan tersebut. (Adiyanta, 2020) sejak pemerintah mengenalkan Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), sekitar 40 juta penduduk masih belum memasuki program tersebut sebagai peserta. Akibatnya, mereka belum mendapatkan perlindungan kesehatan melalui layanan JKN-KIS.

Selain BPJS sebagai jaminan kesehatan ada sebuah program jaminan kesehatan yang dibentuk pemerintah agar meningkatkan penyebarannya. Jamkesmas dan Jamkesda adalah dua program jaminan kesehatan yang

ditujukan untuk warga miskin. Meskipun demikian, cakupan penerima manfaat antara Jamkesmas dan Jamkesda berbeda. Jamkesmas memiliki cakupan yang lebih luas daripada Jamkesda. Sesuai dengan namanya, Jamkesda disediakan oleh pemerintah daerah suatu kabupaten atau provinsi untuk warga miskin. Penerima manfaat Jamkesda umumnya adalah mereka yang belum mendapat manfaat dari Jamkesmas. Oleh karena itu, penerima manfaat dari Jamkesmas dan Jamkesda biasanya merupakan kelompok yang berbeda. Walaupun memiliki tujuan yang sama, terdapat perbedaan antara satu program jaminan kesehatan dengan program jaminan kesehatan lainnya.

Data yang bersumber dari BPS menyatakan bahwa terdapat perbedaan banyaknya penerima Jamkesda antar Provinsi. Besaran kepemilikan Jamkesda harusnya menyasar pada daerah dengan tingkat penduduk miskin yang sama besar dan sebaliknya. Dua hal itu saling berhubungan sehingga penyebaran jaminan kesehatan dapat dilakukan secara tepat sasaran. Ditunjukkan pada tahun 2022 Provinsi Papua tingkat penduduk miskin dengan persentase sebesar 26,56% lalu persentase penerima Jamkesda pada Provinsi Papua adalah sebesar 54,41%. Hal ini dianggap tepat, karena pada tahun 2022 Provinsi Papua berada diperingkt pertama dengan perentase penduduk miskin tertinggi dan sebagai Provinsi dengan penerimaan Jaminan kesehatan berupa Jamkesda yang terbanyak dari seluruh Provinsi yang ada di Indonesia.

Selain kesehatan sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat, pendidikan juga sangat berperan penting dalam meningkatkan taraf kesejahteraan setiap individu. Redahnya tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat

menyebabkan kemiskinan. Pendidikan dianggap sebagai kunci untuk kemajuan suatu negara karena berkaitan erat dengan karakter pembangunan dan ketahanan masyarakat (Adhitya et al., 2022). Tingkat pendidikan yang tinggi diperlukan agar masyarakat dapat mencapai kemakmuran, karena pendidikan yang kurang memadai membatasi kemampuan individu untuk mengembangkan diri dan bersaing di pasar kerja, di mana tingkat pendidikan sering kali menjadi prioritas. Program-program yang difokuskan kepada bidang pendidikan dan kesehatan oleh pemerintah dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan. Menurut (Anisa Marni, 2021) menjelaskan, rendahnya tingkat pendidikan dan akses terhadap layanan kesehatan adalah indikator yang berpotensi mempengaruhi tingkat kemiskinan. Selain itu, belanja bantuan sosial merupakan salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang langsung terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan, karena tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kemiskinan.

Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan rendahnya sumber daya manusia, yang merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan. Menurut (Subagyo et al., 2019) pendidikan memiliki peran penting sebagai pendorong transformasi masyarakat dalam upaya memutus rantai kemiskinan. Melalui pendidikan, dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta memberikan manfaat sosial yang membantu mengurangi angka kemiskinan. Oleh karena itu, pendidikan dianggap sebagai tujuan pembangunan yang esensial bagi seluruh bangsa. Selain itu, pendidikan juga berfungsi sebagai sarana untuk memperluas

wawasan, ilmu pengetahuan, dan keterampilan, sehingga membuka lebih banyak peluang kerja dan mendapatkan upah yang lebih tinggi.

Program Sustainable Development Goals (SDGs), termasuk di Indonesia, diperkenalkan sebagai langkah untuk meningkatkan dan memajukan kesejahteraan masyarakat, termasuk peningkatan kualitas pendidikan. SDGs merupakan kelanjutan dari Millenium Development Goals (MDGs) yang melibatkan lebih banyak negara maju, berkembang, dan negara kurang maju. Salah satu fokus strategis dari SDGs adalah pada pendidikan, khususnya dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-4, yaitu "memastikan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang." Dengan demikian, diharapkan bahwa implementasi program ini akan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia (Safitri et al., 2022).



Gambar 1.3. Persentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMA/Sederajat

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Data dari Badan Pusat statistik (BPS) menyatakan adanya ketimpangan pendidikan di Indonesia pada tahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya selisih yang sangat besar antar daerah. Perbedaan dalam pendapatan antara penduduk perkotaan dan pedesaan mencerminkan ketimpangan dalam akses pendidikan, di mana penduduk perkotaan memiliki kemampuan finansial yang lebih besar untuk mendukung pendidikan tinggi (Wardhana et al, 2023). Tingkat penyelesaian pendidikan tertinggi di Indonesia terletak pada Provinsi D.I.Yogyakarta dengan persentase sebesar 87,92%. Sedangkan Provinsi dengan tingkat penyelesaian pendidikan terendah terletak pada Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan persentase sebesar 38,47%.

Program Sustainable Development Goals (SDGs), termasuk di Indonesia, diperkenalkan sebagai langkah untuk meningkatkan dan memajukan kesejahteraan masyarakat, termasuk peningkatan kualitas pendidikan. SDGs merupakan kelanjutan dari Millenium Development Goals (MDGs) yang melibatkan lebih banyak negara maju, berkembang, dan negara kurang maju. Salah satu fokus strategis dari SDGs adalah pada pendidikan, khususnya dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-4, yaitu "memastikan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang." Dengan demikian, diharapkan bahwa implementasi program ini akan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia

Keterbatasan dalam akses pendidikan memiliki potensi besar untuk menjadi penyebab kemiskinan dengan menghambat kesempatan individu untuk mencapai pendapatan yang lebih tinggi (Woyanti, 2018). Menurut (Adam et al., 2022) Pendidikan tidak hanya berperan sebagai satu-satunya sarana untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi juga penting dalam mengembangkan kreativitas dan keterampilan yang diperlukan untuk bersaing dalam lingkungan kerja. Selain itu, pendidikan membantu mempertajam kemampuan dan keterampilan untuk mengatasi masalah dan menyelesaikannya dengan efektif. Selain pendidikan, faktor lain yang berkontribusi pada kemiskinan adalah tingkat pengangguran.